

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH SE-KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Resy Nur Ariaty
Nim : 22 2016 130**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH SE-KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Resy Nur Ariaty

Nim : 22 2016 130

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resy Nur Ariaty
NIM : 222016130
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah dittulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 10 Februari 2020



Resy Nur Ariaty
222016130

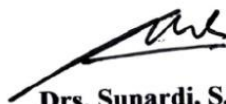
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Resy Nur Arianty
NIM : 222016130
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2020

Pembimbing I



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM:0206046303/784021

Pembimbing II



Mizan, Se., M.Si., Ak
NIDN/NBM:0206047101/859196

**Mengetahui,
Dekan**

h.h. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Sunardi, S.E., MSi selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis, memberikan waktu, masukan, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis, memberikan waktu, masukan, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yang dengan ikhlas telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
9. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Ibu Epi Epriyanti, S.E., M.M dan ayah saya Fairus Muis, S.E., M.M yang telah memberikan bantuan berupa dukungan baik materi maupun non-materi, dorongan, motivasi, kasih sayang, serta doa tulus tanpa henti kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Palembang, 10 Februari 2020

Resy Nur Ariaty

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori.....	11
B. Penelitian Sebelumnya.....	19
C. Hipotesis.....	20
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Operasionalisasi Variabel.....	22
D. Populasi dan Sampel.....	22
E. Data yang Diperlukan.....	23
F. Metode Pengumpulan Data.....	23
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	25
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	28
B. Gambaran Umum Badan Pemeriksa Keuangan.....	33
C. Data Penelitian.....	35
D. Hasil Penelitian.....	36
E. Pembahasan.....	42
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	

A. Simpulan.....	45
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

Abstract

Resy Nur Ariaty / 222016130/ 2020 / Analysis of Financial Performance Comparison of Local Government District / City of South Sumatra Province / Public Sector Accounting

This study aims to find out about the Local Government Financial Performance Comparison District / City of South Sumatra Province. The research data were used, namely the remaining budget (SiLPA) consisting of four counties and four cities of Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Empat Lawang and Lahat and then Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau and Pagaralam. The method used is testing the hypothesis by using independent sample t test models. From the results of the analysis showed that there was no effect of the financial performance of the district with the town in the province of South Sumatra. Excess SiLPA large enough to indicate that the Government is not appropriate in budgeted expenditure budgeting area so that the excess should be used to finance capital expenditure of some activities that are useful for the provision of public services in the current year to be less effective. On the other hand SiLPA can also be used as a reception area in the coming year financing for SiLPA is one of the main sources of financing reception area.

Keywords: Performance, Finance, and SiLPA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2009: 159-160) bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan, pemerintah memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi, karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Melalui laporan keuangan setiap orang dapat memahami kondisi dan posisi keuangan saat ini. Bagi pihak pemerintah daerah, laporan keuangan merupakan cerminan kinerja mereka selama ini.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Fahmi (2018: 2) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu.

Menurut Sujarweni (2015: 107) kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Menurut Hery (2019: 73) pengukuran terhadap kinerja diperlukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terjadi penyimpangan atau deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Mahmudi (2019: 60) pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2009: 121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Untuk memutuskan suatu entitas atau organisasi sektor publik memiliki kualitas yang baik maka ada dua pengukuran yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat entitas atau organisasi sektor publik tersebut telah menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.

Menurut Fahmi (2018: 142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Menurut situs web Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Dalam mengukur kinerja pada organisasi sektor publik, terutama yang nonprofit seperti pemerintah memang tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan indikator-indikator untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Menurut situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2017 adalah Rp 100 Miliar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp 90 Miliar, maka SiLPA-nya adalah Rp 10 Miliar.

Menurut Iswahyudin (2016) keberadaan SiLPA memberikan sinyal adanya Kinerja Keuangan APBD yang baik pada tahun anggaran bersangkutan. Perhitungan SiLPA dapat digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan anggaran. SiLPA yang bersaldo positif memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Sebaliknya jika terjadi SiKPA (Sisa Kurang Perhitungan Anggaran), hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen keuangan daerah dan mengganggu kesinambungan fiskal daerah. Analisis SiLPA dimaksudkan untuk mengevaluasi tentang penyebab terjadinya SiLPA, apakah karena keberhasilan dalam melakukan efisiensi anggaran, atau karena efisiensi dan efektivitas pendapatan daerah, atau justru karena lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak program dan kegiatan tidak terlaksana dengan optimal.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh H. Izudin, Syaparudin dan Syamsuddin H.M. (2013), dengan judul Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungan Dengan Silpa Di Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan Pendapatan Daerah dan komponennya terhadap SiLPA periode 2001 – 2010 mempunyai hubungan positif. SiLPA yang terjadi

disebabkan adanya kelebihan pendapatan, penghematan belanja tidak langsung dan penghematan belanja langsung.

Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi terhadap SiLPA kabupaten Bungo periode 2001 – 2010 dengan menggunakan regresi berganda didapat hasil Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara nyata terhadap pembentukan SiLPA.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid (2013), yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun 2008- 2012 dapat dikatakan baik karena setiap tahun dapat mengoptimalkan kemampuan keuangannya meskipun hasil persentasenya masih berada dalam kategori kurang mampu. Selain itu kinerja keuangan tahun 2008-2012 juga menunjukkan tren positif karena setiap tahunnya dapat meningkatkan kinerjanya dan perolehan SiLPA tahun berjalan selalu meningkat yang dikarenakan adanya efisiensi pada komponen belanja daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yulia Rani (2019), dengan judul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Kinerja Keuangan Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:

1. Komponen dalam APBD yang menjadi penyebab adanya SiLPA adalah komponen pendapatan daerah berupa pelampauan target pendapatan daerah,

komponen belanja daerah berupa sisa belanja daerah baik belanja modal maupun non modal.

2. Pelampauan pendapatan daerah dalam penelitian ini merupakan capaian realisasi atas target pendapatan daerah. Variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap adanya SiLPA di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sisa belanja daerah berupa sisa belanja modal merupakan sisa dana alokasi belanja modal yang tidak terserap pada realisasi belanja modal. Sisa belanja daerah berupa sisa belanja non modal merupakan sisa dana alokasi belanja non modal baik dari belanja langsung maupun tidak langsung yang tidak terserap pada realisasi belanja non modal.
3. Pada daerah yang mampu mempertahankan WTP memiliki SiLPA yang lebih sedikit daripada daerah yang tidak mampu mempertahankan WTP. Sehingga, SiLPA berhubungan negatif dengan kemampuan mempertahankan WTP dengan kata lain SiLPA merupakan indikasi negatif dalam pengelolaan keuangan daerah karena bukan merupakan hasil dari efisiensi atau dana bersih.

Berikut ini disajikan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) periode 2015-2017.

Tabel I.1
Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

(Dalam Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
1.	Palembang	92.711.394.789,17	61.009.778.744,37	97.795.703.766,37
2.	Musi Banyuasin	30.397.429.018,77	29.352.553.179,47	24.119.260.652,89
3.	Banyuasin	61.303.417.038,93	81.912.340.338,80	74.042.914.494,39
4.	Pagaralam	11.871.924.969,63	8.770.262.576,63	6.251.760.339,78
5.	Lahat	85.961.552.570,34	3.086.536.858,94	1.944.074.439,69
6.	Ogan Komering Ulu	56.834.751.746,17	88.621.549.980,87	94.775.750.462,58
7.	Ogan Komering Ulu timur	2.816.258.630,79	2.989.673.000,85	17.809.066.792,79
8.	Ogan Komering Ulu selatan	64.053.318.663,93	6.964.616.813,16	25.480.252.893,88
9.	Musi rawas	9.848.993.887,60	4.939.580.276,69	47.577.225.714,06
10.	Musi rawas utara	11.487.978.106,39	34.449.279.525,75	54.391.854.146,97
11.	Lubuk linggau	3.808.790.125,04	2.760.570.089,94	1.694.371.409,21
12.	Muara enim	41.377.049.925,80	24.044.052.831,22	125.172.898.761,58
13.	Prabumulih	1.548.326.075,30	4.797.350.658,16	28.915.157.937,16
14.	Ogan komering ilir	9.036.007.626,83	7.971.181.796,87	14.772.638.886,20
15.	Empat lawang	955.215.371,48	11.592.143.133,50	15.896.175.305,67
16.	Penukal Abab Lematang Ilir	2.429.368.510,20	3.573.527.278,19	31.700.025.171,94
17.	Ogan ilir	35.812.927.196,12	23.529.908.937,94	30.894.273.481,11

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa setiap tahunnya SiLPA disetiap Kabupaten/Kota mengalami penurunan dan kenaikan. Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat, dan Kota Lubuk Linggau setiap tahunnya SiLPA mengalami penurunan, sedangkan untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Prabumulih, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir justru setiap tahunnya SiLPA mengalami kenaikan.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI (2013) dalam Iswahyudin (2016) bahwa besaran SILPA yang masih tinggi membawa dampak positif dan negatif bagi daerah, dampak positif adanya SILPA adalah adanya imbal balik yang diterima pemda dari SILPA yang disimpan di perbankan. Imbal balik dapat berupa jasa giro atau pendapatan bunga yang masuk dalam akun lain-lain PAD yang sah. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya belanja yang tertunda.

Menurut Iswahyudin (2016) struktur APBD yang baru yang berbasis kinerja memungkinkan terdapatnya SILPA pada akhir tahun anggaran, dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk sumber pembiayaan dan penerimaan untuk tahun berikutnya. SILPA mempresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat bergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung tentang perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Retrieved Januari 29, 2020, from https://palembang.bpk.go.id/?page_id=19317
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Retrieved Januari 29, 2020, from <http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/Profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. (2017). Kinerja Keuangan Daerah. Retrieved November 23, 2019, from <http://bpkad.Banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kinerja-keuangan-daerah/>
- Fahmi, Irham. 2018. Manajemen Kinerja. Bandung: Alfabeta
- Fajar Farhani dan Ida Rosnidah. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan dan Kinerja Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011-2015). *Jurnal Administrasi Publik*. 3(1): 1-18
- H. Izudin, Syaparudin dan Syamsuddin H.M. (2013). Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungan Dengan Silpa Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 1(1): 1-8
- Hasan, iqbal. 2015. Pokok-Pokok materi statistik 2. Edisi kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hery. 2019. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Grasindo
- Iswahyudin. (2016). Pengaruh Belanja Modal , Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten / Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*. 4(6): 152-168
- Lis Djuniar dan Ida Zuraida. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi*. 3(2): 23-24
- Mahmudi. 2019. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, & Abdul Wachid. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*. 2(32): 236-242

Mochamad Fitroh dan Iwan Setya Putra. (2016). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*. 1(1): 1-19

Novira Sartika, Kirmizi, & Novita Indrawati. (2017). Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Sorot*. 12(2): 121-135

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Kabupaten Buleleng. (2017). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Retrieved Desember 23, 2019, from <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/definisi-silpa-menurut-undang-undang-61>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Daftar 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Retrieved Desember 23, 2019, from https://www.kemendagri.go.id/files/201905/Kode&Data%20Wilayah/16.%20SumateraSelatan17_.pdf

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sri Suranta, Bandi, Halim Dedy Perdana, & M. Syafiqurrahman. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*. 5(2): 111-124

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Yulia Rani. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*. 2(1): 13-23